

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, M. D. (2019). *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada.
- Al-Utsamin, M. b. (2015). *Panduan Praktis Hukum Waris*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Anshori, A. G. (2012). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univeristy Press.
- Aprilianti, K. d. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Dahlan, A. A. (2000). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Darmawan. (2018). *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Imtiyaz.
- Diantha, I. M. (2016). *Metodologi Penelitian Normatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Ellyn Poespasari, dkk. (2020). *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Ernawati. (2022). *Hukum Waris Islam*. Bandung: Widina Bakti Persada.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Haries, A. (2022). *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ilhami, D. B. (2014). *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Uversity Press.
- Kustini. (2013). *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Pernikahan Dini*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Puslitbang Kehidupan Kegamaan
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2011). *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

- Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Nofiardi. (2020). *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori dan Praktek* . Lampung: Pustaka Media Design.
- Nugroho, S. S. (2016). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Iltizam.
- Runawi. (2021). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Widina Bakti Persada.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Sjarif, S. A. (2005). *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Prenada Media.
- Somawinata, Y. (2013). *Ilmu Faraidh*. Tangerang: Sintesis Ilmu Indonesia Group.
- Sudirman. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sulistiani, S. L. (2015). *Kedudukan Hukum Anak* . Bandung: Refika Aditama.
- Sunggono, B. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yasardin. (2016). *Dinamika Hukum Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama (Studi Analisis Putusan Peradilan Agama di Indonesia)*. Jakarta: uslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

B. Jurnal

- Anggriawan, T. P. (2021, Februari). Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris. *Pranata Hukum*, 3(1), 3.
- Amelda, F. A. (2022, Juni). Kedudukan Perempuan Hindu Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Lex Generalis*, 3(6), 45.
- Apriyudi, E. (2018). Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah. *Kertha Pratika*, 40(1), 45.
- Budhisulistiyawati, P. A. (2019, Maret). Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 7(2), 255-257.
- Dewandaru, H. K. (2020). Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal. *Notarius*, 13(1), 498.

- Faizal, N. (2022). Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. *Ar-Risalah*, 2(2), 40.
- Holili, W. Y. (t.thn.). Kedudukan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum di Indonesia Terhadap Penganut Sistem Civil Law. *Comserva*, 3(9), 3724.
- Julia, B. d. (2023). Analisis Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama di Surakarta (Studi Perkara Nomor 612/ Pdt. G/ 2022/ PA Ska). *Journal of Science Research*, 3(4), 7164-7165.
- Luki Permana, A. M. (2019, Januari). Konsep Wasiat Dan Waris Dalam Perspektif Agama-Agama Di Indonesia (Studi Komparatif Antara Islam, Kristen, Hindu, Dan Budha). *Jurnal STAI Al Hidayah Bogor*, 1(1), 6.
- Munasib, N. S. (2021). Kedudukan Anak Beda Agama Dengan Orang Tua Terhadap Warisan Menurut Sistem Hukum Waris di Indonesia. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 1(1), 62-63.
- Munasib, N. S. (2021). Kedudukan Anak Beda Agama Dengan Orang Tua Terhadap Warisan Menurut Sistem Hukum Waris di Indonesia. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 1(1), 62-63.
- Nuri Hidayati, K. J. (2022, Juni). Hibah Sebagai Pelunas Hutang. *Lawnesia*, 1(1), 2.
- Puspita, Y. (2020, Desember). Kedudukan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Masyarakat Konghucu Palembang. *Jurnal Raden Fatah*, 4(2), 6.
- Ramadani, G. (2022, Januari). Pengaturan Warisan Beda Agama Dipandang Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(1), 346.
- Rokhim, A. (2020, Desember). Harta Waris Pada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Samarinda". *Legalitas*, 5(2), 3.
- Saly, I. L. (2020, Oktober). Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Secara Agama Budha Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan PN Pontianak Nomor 202/ Pdt. P/ 2015/ PN. PTK). *Justitia Jurnal Hukum*, 4(2), 248.
- Sagitarina, N. (2020, Juni). Analisa Terhadap Putusan Hakim Yang Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Keturunan Pewaris Yang Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan: Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 218 K/ Ag/ 16). *I(4)*, 15.

- Setyawati, N. K. (2017). Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 1(2), 618.
- Shesa, L. (2018). Keterjaminan Kedudukan Dzul Arham dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah. *Al-Istinbath*, 3(2), 158.
- Simanjuntak, E. (2019, Maret). Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Konstitusi*, 16(1), 92.
- Soderi, A. H. (2022). Analisis Putusan MA Perkara No 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974. *Berasan*, 1, 23.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 25.
- Soderi, A. H. (2022). Analisis Putusan MA Perkara No 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974. *Berasan*, 1, 23.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 25.
- Suhartono, D. A. (2022, September). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1(3), 207-208.
- Taufiq, M. (2021, Oktober). Konsep Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Ekonomi dan Hukum*, 5(2), 95.
- Turnip, I. R. (2021). Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Al-Tadabbur*, 6(1), 108-110.
- Walangadi, G. R. (2021, Maret). Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam. *Lex Privatum*, 9(1), 58-59.
- Witjaksono, H. M. (2019, Agustus). Sistem Kewarisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ajaran Agama Budha. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(2), 228-229.
- Zuhriyah, R. R. (2020). Perkawinan Beda Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan. *Kabilah*, 7(1), 193.

Yuliana Ira Ekawaty, M. A. (2020, Maret). Pembagian Harta Warisan Muslim Tionghoa: Studi Komparatif. *Jurnal Amanna Gappa*, 28(1), 24.

Zulfia Hanum, A. S. (2016). Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat. *Holistik*, 1(2), 130-131.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek voor Indonesie*, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Nomor 5076).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/ Yur/ Ag/ 2018 tentang Wasiat Wajibah

D. Lain-Lain

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. Jazilin, M.H

. *Apa sih Peradilan Agama*. (2021, Desember). Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung. Diakses pada November 5, 2023,

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama#:~:text=Peradilan%20Agama%20bertugas%20dan%20berwenang,2006%20tentang%20Perubahan%20atas%20Undang%2D>